

KAJIAN ETIKA DAN PROFESIONALISME DALAM BISNIS KONSTRUKSI INDONESIA

Ni Komang Armaeni¹⁾

1) Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Warmadewa

ABSTRAK

Kurangnya perhatian terhadap etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi di Indonesia oleh penyedia jasa konstruksi, pemilik modal, pemerintah sebagai regulator serta seluruh pihak yang terkait didalamnya, maka secara langsung mendorong berkembangnya pelanggaran-pelanggaran terhadap etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi di Indonesia. Dengan demikian sangatlah penting untuk mengkaji sasaran, kondisi dan hambatan-hambatan dalam penerapan etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi di Indonesia dengan harapan dapat mengetahui perkembangan bisnis konstruksi dan memperoleh pemahaman tentang bentuk-bentuk penyimpangan perilaku dalam industri konstruksi. Sehingga dapat menambah ilmu tentang pentingnya beretika dalam bekerja untuk mencapai profesionalisme dalam bisnis konstruksi di Indonesia.

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi haruslah memenuhi semua aspek yang mendukung kinerja perusahaan itu sendiri, seperti harus memiliki sumber daya yang dapat berkopeten dalam dunia kerja, baik itu dari segi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan legalitasnya karena legalisasi dari suatu perusahaan juga salah satu penentu dari predikat profesionalisme.

Kata kunci: etika, profesionalisme, bisnis konstruksi.

1 PENDAHULUAN

Dunia bisnis konstruksi berkembang dengan pesat dan meluas menjadi bisnis yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Berbagai fasilitas umum maupun sosial di berbagai daerah seluruh Indonesia tengah dibangun, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana dalam konteks ingin menumbuhkembangkan perekonomian nasional.

Namun ada ironi di tengah maraknya pembangunan terkait dengan dunia konstruksi, yang seharusnya mengutamakan kualitas, keamanan dan kenyamanan, masih ada kerjasama antara birokrasi pemilik (*owner*) dengan *stakeholder* (kontraktor) yang mengakibatkan produk konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga tidak memenuhi standar dan tidak berkualitas.

Indikasi umum yang terlihat adalah adanya konflik kepentingan dari masing-masing pihak. Disatu sisi, penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan konstruksinya berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, disisi lain pemilik modal juga berusaha untuk mendapatkan kualitas dan mutu yang lebih baik dari apa yang telah mereka bayar.

Selain itu, kurangnya penerapan etika dan profesionalisme serta transparansi dalam proses dan biaya tender, lemahnya kualitas dokumen tender dan hal terkait lainnya juga berdampak langsung terhadap pelanggaran etika bisnis konstruksi.

Dengan kurangnya perhatian dan penerapan etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi di Indonesia oleh penyedia jasa konstruksi, pemilik modal, pemerintah sebagai regulator serta seluruh pihak yang terkait didalamnya, maka secara langsung mendorong berkembangnya pelanggaran-pelanggaran terhadap etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi di Indonesia.

Profesionalisme dalam bisnis konstruksi sangat menentukan keberhasilan dalam dunia konstruksi karena menyangkut banyak hal didalamnya, yang paling terpenting adalah *skill* dan kemampuan. Penerapan-penerapan dari semua aspek-aspek ini adalah salah satu kunci untuk meraih yang namanya kesuksesan dalam bisnis konstruksi.

Dari uraian diatas maka sangatlah penting untuk mengetahui pengertian tentang etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi. Disamping itu sasaran, kondisi dan hambatan-hambatan dalam penerapan etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi di Indonesia sangatlah penting untuk dikaji lebih lanjut yang dapat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan bisnis konstruksi dan memperoleh pemahaman tentang bentuk-bentuk penyimpangan perilaku dalam industri konstruksi di Indonesia. Sehingga dapat menambah ilmu tentang pentingnya beretika dalam bekerja untuk mencapai profesionalisme dalam bisnis konstruksi.

2 LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Etika

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu etos yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat; akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta etha mempunyai arti „adat kebiasaan“. Arti terakhir ini menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjuk filsafat moral (Bertens, 1993:4).

Etika dibagi menjadi dua yaitu, etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, yaitu bagaimana manusia bertindak secara etis dan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan.

Etika khusus menerapkan prinsip-prinsip moral dasar itu dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual memuat kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial membicarakan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

2.2 Pengertian Profesionalisme

Dalam Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, karangan J.S. Badudu (2003), definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang

profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti: bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, memperoleh bayaran karena keahliannya itu.

Profesionalisme (profesionalisme) ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional (Longman, 1987).

Pengertian profesionalisme secara konseptual hanya dapat diterapkan pada jabatan tertentu misalnya rekayasawan, yang memenuhi sejumlah kriteria. Menurut Martin dan Schinzinger (dalam Dipohusodo 1996) yang memberikan pandangan tentang profesionalisme, bahwa kriteria umum rekayasawan yang professional adalah:

1. Mencapai standar prestasi dalam pendidikan, kemampuan atau kreativitas bekerja, dalam bidang rekayasa.
2. Bersedia menerima tanggung jawab moral terhadap masyarakat, konsumen pelanggan, sejawat, atasan maupun bawahan sebagai kewajiban profesionalnya.

Definisi profesionalisme menurut Morris (Sudarto 2001) adalah memiliki hal-hal sebagai berikut:

1. Metoda profesional

Pada dasarnya metoda melibatkan kompetensi seseorang di suatu bidang yang diperoleh melalui proses pendidikan formal dan pengalaman kerja. Menurut Clark V. Baker (Sudarto 2001), bahwa tindakan profesional harus kompeten, dan orang yang profesional bekerja atau menerapkan sesuai dengan apa yang diketahuinya sesuai dengan lingkup pendidikan atau pengalamannya. Aspek tanggung jawab profesionalisme adalah dedikasi dan keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Biasanya profesional memiliki pendidikan teknik di bidang pengetahuan tertentu dan menerapkan pengetahuan ini dalam jasanya kepada masyarakat.

2. Status profesional

Status profesional diartikan bahwa seseorang memperoleh penghargaan atau pengakuan tertentu di bidang yang digelutinya, atau orang tersebut telah memenuhi persyaratan profesi.

3. Standar profesional

Standar melibatkan legal dan ethical restraints dan bersumber dari hukum negara, dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan profesionalisasi. Mengenai tanggung jawab profesi, bahwa rekayasawan profesional harus mengikuti peraturan dan standar yang berlaku sesuai dengan hukum negara dan peraturan lokal.

4. Karakter profesional

Karakter seseorang merupakan aspek profesionalisme yang terakhir. Dengan melalui berbagai situasi seseorang akan teruji apakah orang tersebut benar-benar profesional.

2.3 Persepektif dalam Mengukur Profesionalisme

Menurut Gilley dan Enggland ada 4 pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan berorientasi filosofis

Pendekatan lambang profesional, pendekatan sikap Individu dan electic.

2. Pendekatan perkembangan bertahap

Individu (dengan minat bersama) berkumpul, kemudian mengidentifikasi dan mengadopsi ilmu, untuk membentuk organisasi profesi, dan membuat kesepakatan persyaratan profesi, serta menentukan kode etik untuk merevisi persyaratan.

3. Pendekatan berorientasi karakteristik

Etika sebagai aturan langkah-langkah, pengetahuan yang terorganisasi, keahlian dan kompetensi khusus, tingkat pendidikan minimal, sertifikasi keahlian.

4. Pendekatan berorientasi non-tradisional

Mampu melihat dan merumuskan karakteristik unik dan kebutuhan sebuah profesi. (Arisandi, 2012)

2.4 Syarat profesionalisme

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadi seorang yang profesionalisme adalah

1. Dasar ilmu yang dimiliki kuat dalam bidangnya.
2. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis.
3. Pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan.

Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Pendapat lain mengatakan Kualiti profesionalisme didokong oleh ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal.
2. Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawaian tersebut. Yang dimaksud dengan “piawai ideal” ialah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.
3. Meningkatkan dan memelihara imej profesion.
4. Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesion melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan

melalui berbagai-bagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.

5. Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampilannya.
6. Mengejar kualiti dan cita-cita dalam profesion.

Profesionalisme ditandai dengan kualiti drajat rasa bangga akan profesi yang dipegangnya. Dalam hal ini diharapkan agar seseorang itu memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesionnya.

Untuk meningkatkan rasa profesionalisme dalam dunia kontruksi, dengan ini diadakan sertifikasi dan saat ini sertifikasi di dunia konstruksi sangatlah diperlukan oleh para pekerja kontruksi khususnya yang bekerja di bidang konsruksi. Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Hal ini dikarenakan dengan mengikuti sertifikasi yang tepat akan sangat membantu bagi kemajuan karir Project Manager tersebut. Berbagai macam Asosiasi sertifikasi tersebut adalah sebagai berikut: IPMA, PMI, PRINCE2, IAMPI dan ASTTI. Asosiasi sertifikasi IPMA, PRINCE2 dan PMI merupakan asosiasi sertifikasi yang paling banyak diikuti oleh Project Manager dibanding dengan asosiasi sertifikasi IAMPI dan

ASTTI. Hal ini dikarenakan asosiasi sertifikasi IPMA, PRINCE2 dan PMI merupakan asosiasi sertifikasi yang berskala internasional dan memiliki daerah jangkauan serta pengaruh dan manfaat secara global.

2.5 Bisnis Konstruksi

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. (Wikimedia, Bisnis, 2014)

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, Konstruksi Struktur Bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. contoh lain: Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jembatan, Konstruksi Kapal, dan lain lain.

Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya) Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan

yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda.

Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur disain, atau arsitek proyek. Orang-orang ini bekerja di dalam kantor, sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. (Wikimedia, Konstruksi, 2014)

Bisnis Konstruksi adalah suatu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Kegiatan yang di tawarkan adalah suatu jasa konstruksi bangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pada pengawasan. Bisnis Konstruksi akan belajalan dengan lancar jika dikelola dengan suatu manajemen yang baik dan disiplin dari perusahaan itu sendiri. Manajemen yang baik akan mendukung perusahaan menuju taraf yang disebut dengan Profesional.

2.6 Sasaran Bisnis Konstruksi

Perusahaan bisnis konstruksi mempunyai sasaran-sasaran antara lain :

1. Keuntungan (*profitability*), yaitu suatu tingkat keuntungan yang dapat menjamin terciptanya putaran dana (*cash-flow*) yang harus dapat menghidupi kegiatan institusinya, tercapainya tingkat keuntungan yang wajar untuk dikembalikan kepada para pemodal yang telah mengambil resiko di dalam proses bisnis konstruksi itu sendiri, serta tercapainya suatu kemampuan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban institusi ini, seperti pembayaran pajak kepada pemerintah, jaminan atas kesejahteraan karyawannya, serta kewajiban-kewajiban lain terhadap kreditor dan rekan-rekannya.

2. Pertumbuhan (*growth*), yaitu sasaran untuk terus tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika serta perkembangan dunia bisnis konstruksi itu sendiri. Suatu institusi bisnis konstruksi yang tidak berkembang dalam berbagai manifestasinya (penjualan jasa, kekayaan, manajemen, tingkat keuntungan, perputaran dana, dan lain-lain) akan tergusur oleh dinamika dunia bisnis konstruksi itu sendiri.
3. Citra (*image*), yaitu pengembangan citra sebagai salah satu sasaran jangka panjang setiap institusi bisnis konstruksi. Citra yang positif, baik di kalangan dunia bisnis konstruksi sendiri maupun pada masyarakat umumnya, merupakan kekayaan (*asset*) yang tidak ternilai yang justru menjadi pusat perhatian utama dari pimpinan institusi-institusi dunia bisnis konstruksi.

2.7 Bisnis Konstruksi Dengan Etika

1. Bisnis Konstruksi akan Mempertaruhkan Segalanya.
Bisnis konstruksi juga mempertaruhkan nama baik, harga diri dan seluruh kehidupan. Perusahaan konstruksi yang rusak namanya karena tidak menggunakan etika dalam melakukan

pekerjaannya, akan dimusuhi rekanan lainnya. Karena itu, diperlukan hubungan yang langgeng, bukan untuk memenangkan tender sesaat saja.

2. Bisnis Konstruksi Menyangkut Hubungan Antarmanusia

Bisnis konstruksi adalah kegiatan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga membutuhkan ketentuan yang dihormati oleh semua orang, yaitu etika yang mengandung nilai moral.

3. Bisnis Konstruksi Adalah Persaingan Yang Bermoral

Bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan norma moral. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur.

4. Bisnis Konstruksi harus Mengikuti Kemauan Masyarakat (klien)

Kebutuhan dan selera selalu maju melebihi alat pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu, bisnis konstruksi harus pula bisa menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus meningkat.

5. Bisnis Konstruksi Harus Disertai Kewajiban Moral

Para pengelola perusahaan konstruksi adalah masyarakat dan anggota masyarakat, dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Sehingga perusahaan konstruksi juga akan dituntut mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap masyarakat.

6. Bisnis Konstruksi Harus Mengingat Keterbatasan Sumber Daya

Perusahaan konstruksi harus bertanggung jawab untuk tidak sekedar mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi harus memeliharanya untuk jangka panjang demi kelangsungan perusahaan konstruksi itu sendiri.

7. Bisnis Konstruksi Harus Menjaga Lingkungan Sosial

Perusahaan konstruksi harus memikirkan kehidupan social masyarakat, demi kelangsungan hidup perusahaan konstruksi itu sendiri. Bisnis konstruksi harus ikut mencari pemecahan atas masalah lapangan kerja, kelestarian alam dan lingkungan social sekitarnya.

8. Bisnis Konstruksi Harus Menjaga Keseimbangan tanggung jawab Sosial

Kekuasaan yang terlalu besar dari bisnis konstruksi jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab social yang sebanding, akan menyebabkan bisnis konstruksi tersebut menjadi kekuatan yang merusak masyarakat.

9. Bisnis Konstruksi Harus Menggali Sumber Daya Berguna

Perusahaan konstruksi yang memiliki tenaga yang terampil, mereka dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi masyarakat melalui berbagai proyek dan kegiatannya.

10. Bisnis Konstruksi Harus memberi Keuntungan Jangka Panjang

Tanggung jawab social merupakan suatu nilai lebih yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan konstruksi. Sehingga akan tercipta suatu citra yang sangat positif dimata masyarakat mengenai perusahaan tersebut. Hal ini akan mendatangkan keuntungan jangka panjang yang mungkin untuk sekarang tidak dapat terbayangkan.

3 METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini disampaikan secara diskriptif yang mengacu pada beberapa sumber pustaka sebagai acuan dan sarana pendukung baik cetak maupun elektronik yang selanjutnya dikaji secara mendalam.

4 PEMBAHASAN

Dalam hal pembangunan suatu proyek konstruksi agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kompak, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-unsur pelaksana pembangunan. Unsur-unsur pelaksana dalam proyek konstruksi sangat penting peranannya dan merupakan kunci dalam menggapai keberhasilan suatu proyek konstruksi.

Bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan norma moral. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur. Dalam arus semakin canggihnya informasi,

segala kecerobohan dan penipuan bisnis konstruksi akan mudah terungkap dan bisa menjadi tindakan bunuh diri bagi sang pelaku. Oleh sebab itu, persaingan dalam bisnis konstruksi adalah persaingan yang bermoral, persaingan menjaga mutu dan nama baik, persaingan merebut kepercayaan masyarakat.

Bisnis konstruksi perlu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya kepada pihak ketiga, yaitu masyarakat seluruhnya yang secara tidak langsung terkena akibat dari keputusan dan tindakannya. Wujud sikap adalah menawarkan pekerjaan atau jasa yang bermutu, menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup masyarakat hidup seluruhnya.

Suatu Konstruksi bangunan akan dapat diselesaikan dengan mutu, waktu dan biaya yang optimal jika suatu organisasi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi menerapkan suatu sistem manajemen yang profesional. Profesional dalam hal ini adalah suatu perusahaan telah menerapkan tata cara legalitas seorang pebisnis dalam bekerja di bidang konstruksi, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, maupun di pengawasan. Selain itu seorang yang profesional juga harus mempunyai keahlian khusus di bidang tertentu dalam lingkup konstruksi bangunan.

Dalam suatu kompetisi usaha yang ketat seperti sekarang ini, semua pengusaha tampaknya memang harus saling berpacu satu sama lain demi

mendapatkan kesempatan (*opportunity*) dan keuntungan (*profit*). Sayangnya, kadangkala dalam upaya meraih kesempatan dan keuntungan tadi, mereka memutuskan untuk menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan apakah ada pihak yang dirugikan atau tidak. Etika yang seharusnya dijunjung tinggi, diabaikan. Bahkan nurani pun, sementara dibutakan. Bila sudah begini, bukan saja etika yang mesti dipertanyakan, tapi juga moral.

Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, maka etika adalah rambu-rambu yang disepakati secara sukarela oleh semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral seharusnya mampu mengembangkan etika (rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang berimbang, selaras, serasi dan juga bertanggungjawab terhadap masyarakat luas.

Perlu diingat bahwa dalam praktik bisnis jasa konstruksi sehari-hari, dikenal apa yang disebut etika bisnis konstruksi. Dengan etika ini, seharusnya bisa menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan.

Sikap-sikap dasar etika bisnis konstruksi di Indonesia seharusnya tercermin dalam ideologi Pancasila yang selalu menjiwai segala tindak-tanduk dan perbuatan manusia. Etika tersebut adalah etika pancasila yaitu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Bisnis konstruksi tidak hanya menyangkut masalah materi, melainkan menyangkut pula hubungan moral. Karena orang yang

tumbuh dan berkembang dalam pribadi dari keinginan mengabdikan kepada Tuhan secara tulus dan sempurna menjadi sumber salah satu motivasi kegiatan-kegiatan bisnis (Bellah, 1976:54).

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Rasa solidaritas social harus menjwai para pelaku bisnis konstruksi di dalam perbuatannya. Ada solidaritas antara perusahaan konstruksi besar dengan perusahaan yang kecil. Seperti yang tertuang dalam Keppres Nomor 16 tahun 1994 bahwa rekanan golongan ekonomi kuat yang mendapatkan proyek dalam suatu daerah harus bekerjasama dengan rekanan golongan ekonomi lemah setempat.

3. Persatuan Indonesia

Bisnis konstruksi nasional harus menyumbang pada upaya peningkatan ketangguhan atau ketahanan ekonomi nasional. Adanya ketentuan penggunaan produksi dalam negeri baik berupa barang atau jasa dalam setiap proyek-proyek pemerintah seperti yang tertuang dalam Keppres 16 Tahun 1994, akan lebih memupuk jiwa nasionalisme pelaku-pelaku bisnis konstruksi, sehingga menjadikan dunia bisnis konstruksi nasional semakin mandiri dan tangguh.

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam bisnis konstruksi harus tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan ditingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan di daerah-daerah untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam Keppres 16 tahun 1994 disebutkan dengan adanya kualifikasi bagi setiap rekanan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, yang dibedakan menurut kemampuan teknis yang dipunyai, besarnya nilai proyek, dan wilayah operasinya.

Telah dijelaskan di atas bahwa suatu perusahaan yang berkategori profesional haruslah memiliki seorang pimpinan yang mempunyai kemampuan managerial yang tinggi, untuk dapat memimpin dan mengatur sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seorang manager biasanya memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan suatu kegiatan konstruksi yang biasa disebut dengan metode kerja proyek konstruksi. Dalam membentuk atau merencanakan suatu metode kerja seorang Manager dituntut dapat menyelesaikan proyek konstruksi dengan optimal, oleh karena itu manager harus memiliki kemampuan yang khusus, dalam bidang konstruksi yang digelutinya.

Profesional secara non akademis dapat disebut dengan pekerja yang sudah berpengalaman. *Experience* dalam melakukan pekerjaan yang mengkhusus di bidang Konstruksi selama beberapa tahun, akan menghasilkan suatu pekerjaan yang bermutu, di karenakan seseorang yang

sudah banyak memiliki pengalaman akan lebih mudah memecahkan masalah yang ada di lapangan di bandingkan orang yang baru tamat sarjana. Maka dari itu pengalaman kerja sangat mempengaruhi profesionalisme suatu organisasi.

Motor penggerak dari suatu bisnis konstruksi supaya dapat berjalan adalah sumber daya manusia dan alat yang di miliki oleh perusahaan tersebut. Sumber daya yang di miliki haruslah memenuhi standar kerja agar pencapaian hasil yang maksimal. Selain itu pengelolaan sumber daya juga harus tepat, guna menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Berikut aspek-aspek yang ada dalam pengelolaan sumber daya:

1. Kinerja Mutu

Untuk meminpin dan mengoprasikan perusahaan perlu dilakukan pengelolaan secara sistematis dan dengan cara yang dapat di buktikan. Kesuksesan perusahaan diperoleh dari adanya penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu dengan melakukan peningkatan kinerja perusahaan secara efektif dan efisien. Perusahaan juga harus membuat mendokumentasikan, menerapkan , dan memelihara sistem manajemen mutu dan melakukan peningkatan berkelanjutan secara efektif sesuai dengan persyaratan.

2. Biaya

Aspek pengendalian memegang peranan yang penting dimana penggunaan biaya harus diperhitungkan sebaik mungkin. agar tercapainya sasaran yaitu efektif dan efiseien.

3. Waktu

Pencapaian waktu yang tepat akan sangat berpengaruh pada besarnya biaya yang akan diperlukan, semakin singkat waktu yang di capai maka sasaran efektif dan efisien sudah dapat tercapai.

Penerapan etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi di Indonesia masih lemah. Sikap kekeluargaan yang masih begitu kuat dalam budaya-budaya kesukuan tertentu di Indonesia dapat menjadi penghambat penerapan etika bisnis. Selain itu kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak tepat sebagai regulator dalam sistem perekonomian nasional juga sangat mempengaruhi penerapan etika bisnis di indonesia. Untuk tingkatan perusahaan di Indonesia, juga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran etika bisnis. Dalam kaitannya dengan kewajiban beretika dalam dunia bisnis, terdapat sedikitnya tiga pihak yang seharusnya beretika, yaitu pebisnis, pemerintah dan konsumen atau pelanggan serta masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung ikut terjaring dalam sebuah proses bisnis. Hambatan-hambatan dalam penerapan etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi nasional adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Budaya

Unsur-unsur yang dapat menghambat dari segi nilai budaya yaitu:

- a. Adanya anggapan tradisional bahwa mencari untung adalah tidak pantas. Paham tradisional ini mempersulit penarikan garis jelas antara usaha bisnis konstruksi yang wajar dan tidak wajar.

- b. Adanya prinsip kekeluargaan
Walaupun sikap atau prinsip kekeluargaan itu penting, namun dalam suatu bisnis diperlukan lebih dari itu. Diharapkan ada kemampuan untuk meminati pula lingkungan sosial yang lebih luas, yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang tertentu.
- c. Adanya tekanan berlebihan pada lingkungan social dan ketidakmampuan untuk meminati struktur-struktur objektif material.
Hal ini terjadi karena kepuasan bekerja berakar dalam lingkungan sosial dan tidak ditentukan oleh kepuasan yang timbul bila seseorang dapat menguasai tugas dalam dunia material. Karena itu, waktu senggang yang dinikmati bersama-sama dengan rekan-rekan, sahabat-sahabat dan sanak saudara lebih penting daripada pekerjaan itu dan hasilnya.

2. Lingkungan Sosial Politik

Jika masyarakat bisnis konstruksi diwarnai oleh praktik-praktik bisnis konstruksi yang didukung oleh kekuasaan politik yang tidak adil, yang pada akhirnya menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat dan tidak wajar, etika profesionalisme bisnis konstruksi pun dapat dipengaruhi.

Di Indonesia, peraturan mengenai etika bisnis konstruksi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pada peraturan tersebut, terdapat hal-hal yang mengatur segala sesuatu tentang jasa konstruksi. Menyangkut etika bisnis, secara tidak langsung tersirat di dalam peraturan tersebut. Penetapan sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar juga telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Selain itu, menyangkut kompetensi penyedia jasa konstruksi (konsultan, kontraktor) terdapat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang bertugas mengklasifikasi, mengkualifikasi, mensertifikasi dan meregistrasi penyedia jasa konstruksi, agar kompetensi yang dimiliki sang penyedia jasa dipastikan memadai dan sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani.

Legalisasi dari suatu perusahaan juga salah satu penentu dari predikat profesionalisme. Setiap bidang pekerjaan memiliki ijin yang berbeda, seperti dalam bidang Hidrologi, Transportasi, dan Struktur. Suatu perusahaan biasanya memilih hanya beberapa dari bidang pekerjaan saja tersebut, di karenakan sulitnya mencari sumber daya yang berkopoten di bidangnya masing-masing. Untuk mencari ijin keahlian tersebut seseorang harus mendaftarkan diri ke Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi (LPJK) di masing-masing daerahnya. Untuk mendapatkan sertifikat keahlian tersebut, haruslah memenuhi prosedur

yang berlaku di LPJK, seperti harus mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang ilmu yang akan di tekuni, dan sudah harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, pada bidang yang ingin di tekuni tersebut.

Contoh-contoh pelanggaran etika dalam bisnis konstruksi (Ramadian Dennis, 2010) yaitu sebagai berikut:

1. Suatu pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di kota-kota besar yaitu pelanggaran terhadap prinsip kejujuran. Seringkali seseorang atau perusahaan tidak mementingkan kejujuran dalam berbisnis. Salah satu contohnya yaitu yang terjadi di daerah Jakarta. Sebuah perusahaan pengembang bisnis perumahan ingin melakukan pembangunan di suatu daerah yang telah direncanakan selama satu tahun sebelumnya. Perusahaan pengembang ini melakukan kesepakatan dengan suatu perusahaan kontraktor dalam pembangunan perumahan tersebut. Di dalam kesepakatan itu telah berisi hal-hal yang menyangkut perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu nya adalah masalah spesifikasi bangunan yang diinginkan oleh perusahaan pengembang yang harus dipenuhi oleh perusahaan kontraktor. Pembangunan perumahan dimulai oleh perusahaan kontraktor dengan waktu yang telah disepakati. Selama proses pembangunan, tidak terdapat kendala yang cukup berat.

Namun, saat pembangunan selesai dilakukan perusahaan pengembang merasa ada yang tidak beres dengan spesifikasi bangunan yang dibangun. Karena selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius. Perusahaan pengembang merasa bangunan yang sedang dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan perusahaan kontraktor. Setelah melakukan investigasi, akhirnya perusahaan pengembang menemukan bukti atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan kontraktor mitra bisnisnya. Perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang. Perusahaan pengembang langsung melaporkan perusahaan kontraktor ke pengadilan. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang.

2. Tanpa diduga dan diprediksi sebuah jembatan runtuh di [Jalan RE Martadinata arah Priok sepanjang 150 Meter](#) pada hari Kamis, 16 september 2010. Kasus runtuhnya suatu konstruksi jalan di martadinata terjadi karena beberapa hal yaitu terkikisnya pondasi jalan tersebut oleh laut Jakarta, kemudian yang

paling mengejutkan adalah karena adanya kesalahan konstruksi pada pondasi bangunan jalan martadinata tersebut yang menyebabkan mudah terkikisnya pondasi oleh air laut. Penyebab amblesnya sebagian badan Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu, ternyata akibat kelalaian teknis terhadap kondisi alam di sekitar jalan itu. Pasalnya, fondasi jalan tersebut hanya ditopang tumpukan sampah. Secara teknis, pembangunan jalan mesti memperhatikan kontur tanah di sekitar terlebih dulu. Sehingga dengan tidak mengesampingkan fenomena perubahan karakter tanah akibat naiknya genangan air tawar dan air laut yang berlebihan, hitung-hitungan kekuatan jalan bisa diketahui. Pondasi badan Jalan RE Martadinata hanya tertumpu pada tanah lumpur yang lembek dan selalu basah. Tanah lumpur dan selalu basah itu, bercampur tumpukan sampah. Bahkan, tanah bercampur plastik, tong, serta material sampah lainnya bisa jelas dilihat di sisi konstruksi jalan yang ambles itu. Apalagi, tepi jalan tidak diperkuat dengan struktur penahan pelengseran atau penggerusan. Jalan ambles karena badan jalan melampaui titik kritis daya dukungnya dalam memangku transportasi kendaraan. Khususnya kendaraan berat dalam frekuensi yang tinggi.

3. Kasus Tenggelamnya Kota Sidoarjo oleh lumpur dari PT. Lapindo. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa kejadian ini mutlak merupakan kesalahan dari perusahaan. Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak negative yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Ada yang mengatakan bahwa lumpur Lapindo meluap karena kegiatan PT Lapindo di dekat lokasi itu. Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006, setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai US\$ 24 juta. Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat [prognosis](#) pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil, mereka merencanakan memasang *casing* setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak meng-

casing lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, lumpur *overpressure* (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (*blow out*) tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpurnya Lapindo (Medici). Genangan Lumpur hingga mencapai ketinggian 6 meter pada pemukiman membuat total warga yang dievakuasi lebih dari 8.000 jiwa, lebih dari 1.500 unit rumah warga terendam, sekitar 200 Ha lahan pertanian dan perkebunan rusak akibat terendam lumpur, lebih dari 16 pabrik tergenang sehingga harus menghentikan aktivitas produksinya, tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendidikan, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon) dan masih banyak lainnya. Lumpur ini juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker. Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (*hemolisis*), jantung berdebar (*cardiac aritmia*), dan gangguan ginjal.

4. Musibah robohnya bangunan peturasan (toilet) tambahan di Pusat Grosir Metro Tanah Abang (PGMTA) yang sedang dibangun tiba-tiba runtuh dan menimpa masyarakat.

5 SIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat di simpulkan:

1. Etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi merupakan suatu studi yang menyangkut permasalahan dan keputusan moral yang dihadapi oleh individu maupun organisasi yang terlibat dalam bisnis konstruksi.
2. Etika dalam bisnis konstruksi di Indonesia yang berjiwakan etika pancasila adalah aturan main yang harus mengikat setiap pelaku bisnis konstruksi, yang apabila dipatuhi secara penuh akan menciptakan ketertiban dan keteraturan perilaku bagi setiap warga Negara. Ketertiban dan keteraturan perilaku ini akan menyumbangkan kematangan dan efektivitas usaha perwujudan keadilan social.
3. Perusahaan profesional adalah suatu perusahaan telah menerapkan tata cara legalitas seorang pebisnis dalam bekerja di bidang konstruksi, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, maupun di pengawasan. Selain itu seorang yang profesional juga harus mempunyai keahlian khusus di bidang tertentu dalam lingkup konstruksi bangunan.
4. Legalisasi dari suatu perusahaan juga salah satu penentu dari predikat profesionalisme. Untuk mencari ijin keahlian tersebut seseorang harus mendaftarkan diri ke Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi (LPJK) di masing-masing daerahnya.

6 DAFTAR PUSTAKA

- Andy Kirana, M.S.A. 1996. *Etika Bisnis Konstruksi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Annissa, R. D. (2013, 04 06). *Pentingnya Mengetahui Etika Bisnis Konstruksi*. Retrieved October 22, 2014, from Understanding Architecture or be as a Architect ?: <http://ratiharch-ratih.blogspot.com/2013/04/pentingnya-mengetahui-etika-bisnis.html>
- Arisandi. (2012, Desember 4). *Arisandi21*. Retrieved September 14, 2014, from wordpress.com: <http://arisandi21.wordpress.com/2012/12/04/pengertian-profesionalisme-ciri-ciri-profesionalisme/>
- Kurniawan, T. (2011, 01 05). *Apa Itu Usaha Jasa Konstruksi...?* Retrieved October 22, 2014, from Catatan Mas_Trianto: <http://triantomedia.blogspot.com/2011/01/apa-itu-usaha-jasa-konstruksi.html>
- Rajapresentasi.com. (1989, Januari 12). *Materi Presentasi Bisnis & Management*. Retrieved November 14, 2014, from Rajapresentasi.com: <http://rajapresentasi.com/2009/11/pr ofesionalisme-dalam-bisnis/>
- Ramadian Dennis. 2010. *Contoh Pelanggaran Etika Bisnis*, (Online) dennisramadian.blogspot.com/2010_11_01_archive.html
Retrieved October 10, 2014,
- Techno Konstruksi. (2014, 06 26). *Peluncuran Konstruksi 2014*. Retrieved 10 22, 2014, from Techno Konstruksi: <http://www.technokonstruksi.com/techno-event/48-peluncuran-konstruksi-indonesia-2014>
- Wikimedia. (2014, Oktober 17). *Bisnis*. Retrieved November 14, 2014, from Wikipedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>
- Wikimedia. (2014, Maret 10). *Konstruksi*. Retrieved November 2014, 2014, from Wikipedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksi>